

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sebagai salah satu faktor yang menyatu dengan peradaban manusia tidak pernah selesai dalam mengemban tugasnya terhadap kesejahteraan hidup manusia. Negara Indonesia sejak awal merdeka telah membuat suatu komitmen dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada pasal 31, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Komitmen awal ini direalisasikan dengan sistem pendidikan sentralisasi. Perjalanan waktu membuktikan semenjak tahun 1945 sampai tahun 1999 muncul isue desentralisasi pendidikan. Pendidikan di Indonesia dilanda keprihatinan momen reformasi dan resesi yang terjadi pada tahun 1997 menyoroti peranan pendidikan dengan tajam. Tajamnya sorotan inilah yang sepertinya dijawab dengan Undang-undang Nomor 22 (UU No. 22) tentang desentralisasi pendidikan.

Indonesia yang terdiri dari berbagai keragaman potensi daerah, bahasa, adat budaya, suku diberikan pelayanan pendidikan formal yang seragam untuk semua tingkatan jenjang dan jenis pendidikan ternyata tidak menunjukkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan diri siswa dan juga masyarakat sekitarnya. Kurang berhasilnya sebagian besar siswa yang menjadi lulusan pendidikan formal untuk semua tingkatan yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi (PT)

membuat para pembuat kebijakan pendidikan berfikir lebih jauh tentang sistem pendidikan.

Sistem pendidikan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi menuntut peran aktif dari masyarakat untuk bertanggung jawab dalam merealisasikan akuntabilitas sekolah. Dalam merealisasikan akuntabilitas sekolah inilah peranan masyarakat untuk bekerjasama dalam menentukan tujuan atau harapan masyarakat terhadap sekolah yang ada di lingkungannya. Masyarakat tidak hanya menyampaikan harapannya saja kepada pihak sekolah tetapi juga berpartisipasi dalam usaha untuk mencapai tujuan baik dalam bentuk pendanaan maupun teknis. Untuk bekerjasama dengan sekolah dalam membuat program kegiatan maupun pendanaan dibutuhkan kepala sekolah yang orientasi kepemimpinannya terfokus atau berorientasi terhadap pekerjaan.

Pijakan teoretis kepemimpinan yang berorientasi terhadap pekerjaan dikemukakan Frederick W. Taylor (1903 : 39) yakni untuk meningkatkan produktivitas kerja dan memudahkan pekerjaan perlu pengkajian secara ilmiah dalam kerja dan menetapkan standar kerja. Dalam manajemen berbasis masyarakat (*School Based Management*) yang direalisasikan menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dibutuhkan metode kerja dan standar pekerjaan yang jelas. Masyarakat sebagai mitra kerja sekolah membutuhkan informasi yang nyata dalam bentuk tujuan yang akan dicapai dan metode atau cara pencapaiannya. Tujuan yang ingin dicapai Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam orientasi kerjanya harus mencapai tujuan

ganda. Satu pihak memberdayakan lulusan melanjutkan studi, dan pihak lain untuk mencari kerja.

Berdasarkan kenyataan pada SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 3 dari hasil wawancara terhadap guru, kepala sekolah dan studi dokumenter mengenai kebijakan kepala sekolah masih terjadi perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Harapan yang diinginkan Mendiknas (1999) yaitu dilaksanakannya implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pada setiap sekolah dengan baik, sementara kenyataan masih belum maksimalnya implementasi MPMBS, yang dapat dilihat dengan belum dioptimalkannya peran serta guru dalam implementasi tersebut.

Guru akan berhasil dalam menerapkan MPMBS apabila Kepala Sekolah yang memimpinya memberikan pengaruh, arahan dan menggerakannya dengan berorientasi pada tugas guru. Di samping berorientasi pada tugas juga membina hubungan manusiawi dan mendekati guru dengan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi.

Persepsi yang jelas tentang tugas dan orientasi yang digunakan mengarah kepada penerapan MPMBS dan hubungan yang harmonis akan memacu guru dalam mencapai keberhasilan MPMBS. Dalam suasana yang harmonis dan kondusif, gaya kepemimpinan yang digunakan kepala sekolah diperkirakan akan relevan dengan tantangan pekerjaan guru. Guru dengan perasaan tenang akan bekerja dan mengacu kepada peraturan maupun kebijakan yang diterapkan sekalipun menghadapi tantangan kesediaan guru dalam menerapkan MPMBS akan disertai pula oleh

disiplin kerja yang dapat merealisasikan program kegiatan. Program kegiatan pembelajaran MPMBS menuntut adanya disiplin kerja.

Dalam tulisan ini, penulis ingin mengetahui seberapa besarkah hubungan antara kemampuan guru mampu menerapkan MPMBS dengan persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan penerapan disiplin kerja guru, untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang ada di SMA Negeri Tebing Tinggi berkaitan dengan kemampuan guru dalam menerapkan MPMBS antara lain : Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemampuan guru dalam menerapkan MPMBS ? Apakah masyarakat telah berpartisipasi dalam membantu program sekolah ? Bagaimana dengan pelatihan MPMBS, apakah telah dilaksanakan secara memadai ? Apakah kepala sekolah telah mempunyai persepsi yang tepat dalam memimpin guru ? Apakah guru telah mempunyai disiplin kerja yang baik ? Apakah komite sekolah telah berperan aktif dalam membantu sekolah ? Bagaimana dengan dana, apakah telah dikelola secara transparan ? Apakah guru telah mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi ? Apakah guru telah mempunyai kompetensi profesional yang handal ? Adakah hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah dengan keberhasilan guru menerapkan MPMBS ? Adakah hubungan disiplin kerja dengan kemampuan menerapkan MPMBS ?

C. Batasan Masalah

Untuk memperoleh pembahasan yang mendalam, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengkajian yaitu : persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah, disiplin kerja guru dan kemampuan guru dalam menerapkan MPMBS. Penelitian ini hanya dilakukan pada SMA Negeri se-kota Tebing Tinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besarkah hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah dengan kemampuan guru menerapkan MPMBS ?.
2. Seberapa besarkah hubungan antara disiplin kerja guru dengan kemampuan guru menerapkan MPMBS ?.
3. Seberapa besar hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja guru secara bersama-sama dengan kemampuan guru menerapkan MPMBS pada SMA Negeri Kota Tebing Tinggi ?.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Besarnya hubungan persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah dengan kemampuan guru dalam menerapkan MPMBS.

2. Besarnya hubungan disiplin kerja guru dengan kemampuan guru mencrapkan MPMBS.
3. Besarnya hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin kerja guru secara bersama-sama dengan kemampuan guru dalam menerapkan MPMBS pada SMA Negeri Kota Tebing Tinggi.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara praktis maupun secara teoretis. Manfaat secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan kepada :

1. Kepala Sekolah SMA sebagai acuan dalam memimpin guru untuk keberhasilan menerapkan MPMBS.
2. Bagi seluruh *stakeholders* pendidikan di SMA untuk dijadikan acuan dalam implementasi penerapan MPMBS.
3. Sebagai acuan bagi para guru, khususnya guru SMA Negeri Tebing Tinggi dalam mengimplemenasikan pelaksanaan MPMBS.

Manfaat secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi kepada :

1. Peneliti lain sebagai khasanah untuk pelaksanaan penelitian lanjutan yang relevan dengan judul penelitian ini.
2. Sebagai acuan teoritis dalam memperbaiki persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah.

3. Sebagai acuan teoritis dalam implementasi peningkatan disiplin kerja guru, dalam rangka penerapan MPMBS.

